

# **Nono Sampono Dorong Pemerintah Membuat Kebijakan Tata Kelola Ruang Laut Nasional**

**Jakarta-Kemenko Maritim (22/10)**—Dalam Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan Kementerian Koordinator Maritim dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertajuk “Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Laut Nasional”, Nono Sampono dalam paparannya sebagai narasumber menyampaikan bahwa sangat penting dan mendesak penyusunan kebijakan Rencana Tata Kelola Ruang Laut Nasional sekaligus bisa melengkapi kebijakan tata kelola ruang darat dan udara.

“Dalam kesempatan ini saya mendorong semua stakeholder khususnya Kemenko Maritim dan KKP untuk sesegera mungkin untuk menyusun kebijakan tata kelola ruang laut nasional. Jangan sampai muncul berbagai kepentingan tidak bertanggungjawab dalam ruang laut nasional kita.” Tegas mantan Korps Marinir TNI Angkatan Laut di sela-sela presentasi.

Selain itu, mantan Kepala BASARNAS RI ini menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan rencana tata kelola ruang laut nasional juga merupakan salah satu upaya dalam rangka ikut memberikan kontribusi dalam mendukung visi-misi besar pemerintah Jokowi-JK untuk menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia sekaligus ingin membangun kekuatan maritim untuk Indonesia yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity), dan berwibawa (dignity).

“Penyusunan kebijakan tata kelola ruang laut nasional adalah salah satu upaya dalam rangka mewujudkan gagasan besar Poros Maritim Dunia pemerintah Jokowi-JK, dimana mengajak kita semua kembali ke jati diri kita sebagai bangsa bahari dan maritim, tentu dengan tujuan untuk Indonesia yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa dalam pandangan dunia.” Ujar Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si

Dalam kesempatan FGD ini juga, senator Indonesia asal Maluku dan Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Kawasan Timur ini menguraikan bahwa realitas saat ini dimana laju populasi manusia atau penduduk Indonesia sudah mencapai ± 250 juta jiwa, dimana muncul praktik-praktik eksploitasi dan eksplorasi laut dan dasar laut serta industrialisasi kemaritiman dimana telah menimbulkan berbagai persoalan terhadap Transportasi Laut, Industri Maritim, Perikanan, Bioteknologi Kelautan, Wisata Bahari, Mineral Dasar Laut, Minyak dan Gas, Industri Garam, Bangunan Laut, Jasa Kelautan, Reklamasi Wilayah Pesisir, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Lahan Bagi Kepentingan Pertahanan Keamanan. Diluar hal-hal tersebut masih ada permasalahan yang ditimbulkan oleh alam dan manusia, seperti:Perubahan Iklim, Banjir dan Rob, Gempa Bumi dan Tsunami, Kerusakan Terumbu Karang dan Mangrove serta Erosi dan Abrasi.

“Dengan laju pertumbuhan penduduk yang sudah mencapai sekitar 250 juta, kemudian muncul praktik eksploitasi dan eksplorasi laut yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan di ruang laut kita.” Ungkap Nono Sampono.

Dalam *closing statemen* Alumnus Doktoral Ilmu Kelautan dan Perikanan IPB ini, mengutarakan bahwa dimana saat ini kemajuan teknologi telah memungkinkan manusia untuk meningkatkan pemanfaatan atas ruang laut termasuk dasar laut, sehingga akan terjadi perebutan wilayah laut sehingga akan terjadi perebutan wilayah laut baik pada tingkat domestik maupun antar negara.

Mengantisipasi kemungkinan masalah tersebut maka sangat diperlukan kebijakan Rencana Tata Ruang Laut nasional yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem sumber daya kelautan serta dapat mengatur berbagai kepentingan baik secara domestik, dan juga batas teritorial atau ekonomi antar negara.

“saya tegaskan bahwa nantinya kebijakan Rencana Tata Ruang Laut nasional tentunya dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan Poleksosbud dan Hankam dengan memperhatikan lingkungan hidup dan kelestarian ekosistem sumber daya kelautan serta dapat mengatur berbagai kepentingan baik secara domestik, dan juga batas teritorial atau ekonomi antar negara.”  
Demikian tutup Nono Sampono

**Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si**

**Ketua Kaukus DPD RI Indonesia Timur dan Anggota DPD RI Dapil Maluku 2014-2019; Mantan Komandan Korps Marinir; Mantan Komandan Paspampres, Mantan Gubernur AAL, Mantan Kepala Basarnas RI**